



## **PEMAKNAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PULAU NATUNA**

### **Prespektif Teori Mandala**

## **THE MEANING OF DEFENSE AND SAFETY OF NATUNA ISLANDS**

### **Mandala Theory Perspective**

**Laode Muhmad Fathun<sup>1</sup>**

**Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Jakarta**

[laodemuhammadfathun@upnvi.ac.id](mailto:laodemuhammadfathun@upnvi.ac.id)

#### **Abstrak**

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis formulasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam klaim sepihak China terhadap wilayah Laut Natuna bagian Utara. Klaim tersebut didasari oleh argumentasi China bahwa wilayah tersebut adalah wilayah tradisional pencarian ikan China. Paper ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka. Hasil yang didapat kan bahwa formulasi model kebijakan luar negeri Indonesia terhadap klaim China di wilayah Laut Natuna Utara adalah menggunakan pendekatan diplomatic. Hal ini relevan dengan karakter Indonesia sebagai Negara *middle power*. Diplomasi *middle power* selalu menjadi katalisator, fasilitator dan menejer dalam penyelesaian konflik kawasan regional atau internasional. Kondisi ini sesuai juga secara teori dengan model kebijakan luar negeri yang di desain oleh John Lovell yakni menggunakan metode akomodasi. Lebih lanjut, kondisi ini sesuai juga dengan karakter kebijakan luar negeri dalam teori Mandala yang disebut dengan Asana.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Indonesia, Natuna, *middle power*, diplomasi, teori mandala

#### **Abstract**

*This paper aims to explain and analyze the formulation of Indonesia's foreign policy in China's unilateral claim to the North Natuna Sea area. This claim is based on China's argument that this area is a traditional Chinese fishing area. This paper uses a qualitative method of analysis with analysis data collection techniques. References. The results obtained are that the formulation of Indonesia's foreign policy model on China's claims in the North Natuna Sea area uses a diplomatic approach. This is relevant to Indonesia's character as a middle power country. Middle power democracy has always been a catalyst, facilitator and manager in resolving regional or international conflicts. This condition is also in theory consistent with the foreign policy model designed by John Lovell, namely using the accommodation method. Furthermore, this condition is also consistent with the character of foreign policy in Mandala theory called Asana.*

*Keywords: Indonesian foreign policy, Natuna, middle power, diplomacy, mandala theory*



## PENDAHULUAN

Wilayah yang memiliki geografis dan demografis yang strategis, berpotensi mengalami ancaman baik tradisional dan non tradisional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan adalah kemampuan negara menjaga dirinya dari ancaman dan rongrongan aktor lain baik dari dalam maupun luar negeri. Pertahanan erat kaitannya dengan keamanan dimana keamanan adalah kondisi dimana negara bisa melindungi nasibnya. Sederhananya adalah pertahanan adalah instrumen yang bernuansa teknis sedangkan keamanan adalah sifat kebebasan yang bernuansa ideasional atau rasional. Ideasional yang dimaksud adalah keamanan itu kadang hanya sebuah persepsi yang dibangun karena konstruksi sosial. Sehingga, keamanan itu kemampuan awalnya adalah upaya membangun psikologis, rasionalis, birokratis dan teknis. Ketika negara mampu menghadapi ancaman-ancaman itu maka disitulah daya elastis negara sehingga mampu bertahan atau penulis sebut dengan ketahanan atau daya lenting. Situasi ini kemudian yang dialami Indonesia di laut Natuna yang secara geopolitik adalah milik Indonesia dan diakui oleh UNCLOS 1982. Tentunya sikap asertif China tersebut mengancam keamanan baik nasional (Indonesia) maupun regional (ASEAN).

Barry Buzan (1991) menyebutnya terminologi keamanan itu sendiri berasal dari kata "*secures*". *Secures* merupakan gabungan dari kata "*se*" yang berarti tanpa dan "*curus*" yang berarti bebas dari bahaya dan ketakutan. Keamanan pada dasarnya berbicara tentang bagaimana terbebas dari ancaman. Artinya isu keamanan adalah isu yang memastikan negara dan segala sesuatu yang ada dalam negara aman dan bebas dari ancaman. Andi Widjanto menyebutnya ketika suatu negara aman atau stabil maka negara tersebut harus bisa memastikan keamanan negaranya, keamanan insani dan keamanan publik.

Ukuran inilah yang menjadi fondasi dasar bahwa negara tersebut bisa dikatakan aman. Lebih lanjut, keamanan pada dasarnya berbicara tentang daya tahan atau ketahanan. Negara ketika bisa terbebas dari ancaman maka sebenarnya negara tersebut bisa bertahan atau bisa menahan gempuran ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dengan demikian, keamanan yang hasil akhirnya adalah ketahanan merujuk pada bebas dari atau bebas untuk yang kemudian dikatakan dengan *survival, self help*. Menurut Barry Buzan (1991), keamanan yaitu:



*Security is primarily about the fate of human collectivities. .about the pursus it of freedom from threat. The bottom lines is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the condition of existence.. Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environmental*

Salah satu ancaman pertahanan dan keamanan bagi Indonesia adalah munculnya agresifitas China di Laut China Selatan yang berebepadasalah satu wilayah kedaulatan Indonesia yakni laut Natuna bagian utara. China yang asertif mencoba mengkalim wilayah tersebut secara sepihak yang tentunya bertentangan dengan hukum internasional. Konflik Laut China Selatan (LCS) yang semakin memanas dengan hadirnya Amerika bersama aliansinya serta China bersama aliansinya membuat stabilitas regional semakin tidak kondusif. Situasi ini membuat Indonesia harus mengambil sikap. Sikap pertama adalah mengamankan kedaulatannya dan sikap kedua adalah memimpin negara-negara di ASEAN untuk bersikap rasional dan tidak terprovokatif. Mengapa ni penting 1) Indonesia adalah pendiri ASEAN dimana ASEAN selalu menjadi soko guru kebijakan luar negeri dan diplomasinya, 2) Indonesia adalah negara dengan kapasitas militer terkuat di ASEAN sehingga bisa menjadi pelindung bagi negara lainya 3) kedaulatan, keamanan dan ketertiban kawasan adalah domain bersama 4) diplomasi pertahanan adalah solusi terbaik dalam menekan asertifnya

China di Laut China Selatan dengan bentuk *Collective security*.

Penulis beragumen Indonesia sebagai negara dengan basis *middle power*, tidak selayaknya memanas diri dalam klaim China tersebut. Indonesia yang terkenal sebagai negara yang selalu menjadi mediator tentunya adalah bekal buat Indonesia mampu menyelesaikan situasi ini dengan persuasif. Memanasnya situasi ini karena masing-masing negara tidak bisa mengontrol rasionalitasnya untuk konfrontasi. Masing-masing negara sepertinya ingin menunjukkan kapasitasnya untuk bisa menguasai.

Prespektif keamanan maritim menurut Julian Corbett bahwa makna maritim pada tiga situasi strategi yakni *sea denial* yaitu kemampuan negara bisa encegahan yang dilakukan oleh negara dengan pola komunikasi dimana Negara mencegah agar wilayah tersebut tidak dikuasai oleh negara lain. Metode ini dengan memastikan dua hal yakni komunikasi kelembagaan internal dan komunikasi aliansi eksternal. Selain itu, *sea control* atau situasi negara bisa mengonrol laut dengan pengerahan armada ada posisi wilayah yang menjadi target kekuatan lain. Artinya posisi ini bisa dikatakan dengan posisi *deterrence* sebagai upaya penaklukan psikologis kepada lawan. Dan terakhir *power projection*, situasi ini memaksa negara untuk bertahan dan

menyerang karena situasi dimana wilayah berpotensi untuk direbut oleh kekuatan lain. Oleh sebab itulah artikel ini akan menganalisis model strategi formulasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap asertifnya China di Laut Natuna bagian Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pertahanan dan Keamanan Prespektif Mandala**

Mandala sebagai sebuah Teori Hubungan Internasional Non Barat menawarkan sebuah prespektif baru. Mandala sebagai sebuah refleksi pemikiran dalam hubungan internasional lahir dari gagasan Chankya dalam Arthasashtra Kautilya (298-322 SM). Kata kunci dari teori ini adalah tentang memaknai lingkungan strategis. Poin utamanya adalah lingkungan itu akan menciptakan kawan dan lawan. Sehingga, kepala Negara sebagai kekuatan utama dalam mengontrol lingkungan strategis. Raja Mandala adalah situasi dimana Negara tersebut menjadi pemimpin aksi. Teori merumuskan enam fondasi formulasi kebijakan luar negeri dan diplomasi yang akan dikeluarkan oleh negara dalam situasi yang berbeda. Adapun enam istilah tersebut adalah a) Sandhi yang dimaknai dengan sebagai bentuk kebijakan untuk terlibat dalam perjanjian aliansi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan serta memperkuat kekuatan

untuk mengalahkan lawan, b) Vigrha merupakan kebijakan konfrontatif yang bisa dilakukan oleh Negara yang kuat. Kebijakan ini sebagai bentuk penunjukan kekuatan diantara penguasa, c) Asana merupakan kebijakan bersikap netral ketika negara tersebut memiliki status negara yang sama, d) Yana adalah kebijakan rasional Negara untuk memutuskan berperang. Hal ini menyangkut kalkulasi kekuasaan dan kekuatan. Logistik dan bala tentara, e) Samsraya merupakan kebijakan yang meminta perlindungan kepada Negara yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi agar tidak mudah diekspansi. Hal ini biasanya dilakukan oleh Negara kecil dan f) Dvaidhibhava adalah kebijakan yang dirumuskan untuk meminta perlindungan damai dari raja tertentu agar bisa memperoleh kekuatan untuk bisa bermusuhan dengan raja lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa dari enam pola kebijakan luar negeri di atas setidaknya menunjukkan empat hal yakni Negara kuat (*great power*) yakni Sandhi dan Vigrha, kemudian Negara netral atau *middle power* yakni Asana, Negara lemah (*less power*) atau Samsraya dan negara bermuka dua atau *raison the state* serta Dvaidhibhava dan Negara *deliberative state* atau Yana (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).

## **b. Formulasi Model Kebijakan Luar Negeri**

James Rosenau menjelaskan Intinya kebijakan politik luar negeri adalah serangkaian proses artikulasi dari prinsip, gagasan dan ide serta prinsip yang diambil dari konstruksi pluratif nasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Rosenau juga menyebutnya sebagai kombinasi antara *internal life* dan *external needs* (Rosenau, 1971) (Rosenau 1974) (Rosenau, 1981).

Lebih lanjut, Tunas (1965) menjelaskan kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi berkelanjutan antara aktor dan lingkungan mereka. Untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, mereka memperhitungkan konteks internasional. Distribusi kekuatan antar negara dan pengaruh para pemangku kepentingan transnasional dan organisasi antar pemerintah secara parsial menentukan kebijakan luar negeri. Pemerintah yang mengadopsi kebijakan politik luar negeri memandang sistem internasional melalui filter mereka sendiri, yang mungkin budaya, organisasi atau kognitif. Karena itu, untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, itu juga penting untuk mempelajari dinamika domestik negara bagian dan proses pengambilan keputusan (Jean Frédéric Morin, 2018). Dengan demikian formulasi kebijakan luar negeri ini akan digunakan dalam model analisis kebijakan luar negeri.

## **PEMBAHASAN**

Studi kebijakan politik luar negeri ada banyak teori dan asumsi yang coba menjelaskan fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negara bukan hanya bisa dilihat dari kebutuhan politik domestik yang di tujukan kepada Negara lain, dan atau respon terhadap Negara lain dalam sebuah sistem internasional. Dalam artian pendekatan yang ada sistemik dan analitik yang bertumpu pada kebutuhan internal dan eksternal. Namun yang perlu dipahami adalah kebijakan luar negeri merupakan sebuah peristiwa yang *central mystery* yang akan susah ditebak objeknya secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada akan susah menemukan informasi yang 100% murni tentang proses perumusan kebijakan luar negeri sebuah Negara. Objeknya memang ada tetapi sifatnya kabur (Warsito, 1998).

Lebih lanjut, (Holsti, 2016) mengatakan bahwa kebijakan politik luar negeri bukan hanya permainan kekuasaan dan strategi, tetapi diresapi dengan ide, mitos, dan bahkan agama. Istilah reorientasi mengacu pada niat pembuat kebijakan untuk melakukan restrukturisasi hubungan bangsa mereka dengan negara lain. Untuk sebagian besar negara, hubungan eksternalnya, berbagai tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan yang aktor lain terkadang

secara acak diarahkan melintas batas negaranya. Selain itu, Tunas dan Tunas (1965) menjelaskan kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi berkelanjutan antara aktor dan lingkungan mereka. Untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, mereka memperhitungkan konteks internasional. Distribusi kekuatan antar negara dan pengaruh para pemangku kepentingan transnasional dan organisasi antar pemerintah secara parsial menentukan kebijakan luar negeri. Pemerintah yang mengadopsi kebijakan politik luar negeri memandang sistem internasional melalui filter mereka sendiri, yang mungkin budaya, organisasi atau kognitif. Karena itu, untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, itu juga penting untuk mempelajari dinamika domestik negara bagian dan proses pengambilan keputusan (Jean Frédéric Morin, 2018)

Formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan fondasi pemikiran para ahli di atas tentunya memiliki tantangan apalagi Indonesia sebagai negara maritim. Saat ini yang menjadi salah satu fokus Indonesia adalah Laut Natuna bagian utara.

Pulau Natuna berdasarkan posisi geografisnya berdekatan dengan Laut China Selatan yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam perspektif sejarah pulau masuk dalam wilayah geografis

kerajaan Pattani dan dan Johor diMalaysia sejak tahun 1957. Namun setelah berjalannya waktu kepulauan Natuna yang memiliki tujuh anakpulau masukdalamwilayah kepulauan Riau atau Kesultanan Riau. Sejakitulah ,Indonesia mendaftarkan pulau Natuna sebagai bagian darikedaulatannya pada18mei1956 diPBB sebagaiupaya legalisasiwilayah tersebut(Gischa, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan berbasis kepulauan tentunya memiliki tantangan konfrontasi dengan negara tetangganya. Hal tersebut kemudian berimbas puladengan wilayah pulau Natuna ini. Fakta sejarah hubungan Indonesia yang selalu merenggang soal wilayah kedaulatan negara menjadikan kedua negara sering berkonflik tentang wilayah batas laut. Konflik Indonesia dengan Malaysia tentang Natuna memang sudah sejak lama karena Malaysia juga mengklaim wilayah tersebut. Namun pada tahun pada tahun 1962-1966 Malaysia tidak melanjutkan klaim tersebut secara berkepanjangan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari posisi strategis wilayah pulau Natuna yang menyimpan potensi sumber daya alam yang baik untuk eksploitasi demi kemakmuran rakyat.

Tntangan Indonesia lainnya adalah dalam pengelolaan pulau Natuna adalah perilaku illegal yang dilakukan oleh nelayan China yang

mencuriikan di wilayah Natuna tersebut. Tepatnya hal yang menggemparkan ketika nelayan China dikawal oleh coast guard China yang untuk mencuriikan di wilayah Natuna. Kejadian ini pada tanggal 31 desember 2019 lalu yang yabf membuat Indonesia meradang . Kapal China tersebut melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah diakui oleh hukum laut internasional. Akibatnya Presiden Indonesia dan Mentri Luar Negrri Indonesia merespons tindakan tersebut bahwa seluruh wilayah Indonesia telah diakui oleh UNCLOS 1982. Dan setiap negara wajib menghargai hukum internasional sebagai bentuk kehormatan dan legitimasi.

Legitimasi ZEE Laut natuna utara sebagai wilayah NKRI , sesuai dengan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai *coastal state* yang diberi wewenang untuk membuat peraturan seperti lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, bea cukai, *quarantee* dan lain-lain) memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Selain itu, tertuang dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 tertuang bahwa Negara lain harus menghormati dan menghargai setiapperaturan yang dibuat oleh oleh Indonesia sebagai *coastal state*.

Definisi ZEE Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 (H. M. Fauzan, 2017) yaitu Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia aadalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Likadja, 1988)

Klaim wilayah pulau Natuna tentunya tidak terlepas dari kliam China terhadap sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan yang dimulai sejak tahun 1947. Konsekuensi klaim sepihak tersebut menjadikan stabilitas regional ASEAN semakin memans. China berkonflik dengan beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan termasuk Indonesia. Salah satu upaya Indonesia untuk merespons kebijakan tersebut kemudian merubah nama Natuna menjadi Laut Natuna Utara yang masih menjadi bagian wilayah Propinsi Kepulauan Riau.

Namun sejak lama tepatnya pada tanggal 19 Juni 2016, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying memberikan pernyataan yang berisi bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan tiongkok di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara adalah sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka, atau *traditional fishing ground*. Setelah klaim dari Indonesia mengenai Laut Natuna Utara, kapal-kapal China masih banyak melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara. (wirawan,

2016). Kondisi ini tentunya tidak relevan dengan hubungan internasional yang saling menghargai dan menghormati. Kedua Negara harusnya China menjadikan hukum laut sebagai fondasi kebijakan luar negerinya untuk mengklaim wilayah Laut Natuna Utara.

Penulis mencoba menganalisis operasional teori dalam kasus Natuna bagian Penulis berargumen bahwa Indonesia harus kembali lagi pada status negaranya yakni *middle power*. negara *middle power* Indonesia harus kembali pada orientasi politik luar negerinya yang diimplementasikan melalui diplomasi. Dalam konteks pemaknaan keamanan maritim Indonesia harus menempuh dua situasi yakni *see denial* dimana Indonesia harus menjadi penggerak komunikasi di level regional. Fortuna Anwar menyatakan bahwa karakter diplomasi negara *middle power* adalah menjadi katalisator dimana melalui komunikasi ini Indonesia harus mengaggas pertemuan konstruktif melebitakan disemua actor yang terlibat. Posisi regional kawasan yang sedang anarkis harus dihadapi dengan optimis rasionalis dengan pendekatan diplomatis.

Selain itu, *middle power* berkarakter fasilitator, pada situasi ini Indonesia harus memimpin pertemuan regional untuk menekan asertifnya China. Dalam konteks keamanan *maritime sea power* memang bisa dilakukan Indonesia hanya untuk mencegah *deterrence* bukan konfrontasi. Posisi ini akan

menentukan posisi Indonesia bahwa secara psikologis Indonesia siap bertahan melindungi wilayahnya. Walaupun secara kalkulasi peralatan pertahanan dan keamana belum tentu menang. Indonesia pernah mengaggas *Code of Conduct* Laut China Selatan sebagai konvensi rivalitas negara-negara kawasan yang harus dikontrol. Sebab apabila negara-negara tidak memiliki rasional, ideasional bahwa perang adalah hanya menimbulkan kehancuran maka egoisitas anarkis akan tercipta. Poin terakhir adalah Indonesia sebagai negara menejer dimana selalu mengawasi dan pemimpin aksi. Pada poin ini Indonesia harus mengambil posisi asana atau posisi netral Indonesia tidak boleh mengibah atau condong pada satu sisi kerna Indonesia bermitra dengan semua. Ibaratnya adalah Indonesia ada dalam sebuah lautan dimana disekitarnya ada hewan ganas, baik itu paus, piranha, hiu dan ikan ganas lainnya yang siap memangsanya. Posisi strategis ini dalam emeknai lingkungan strategis adalah Indonesia tidak boleh menciptakan lawan tetapi memperbanyak teman. Penulis berfikir Indonesia dan China sudah bermitra sudah sejak lama dan tidak mungkin China akan mencamplok wilayah Natuna Utara dengan klaim sepihak. Saat ini dunia bukan kondisi ekspansionis dan alienisasi.

Teori Mandala menekankan perlunya Negara untuk taat pada dharma atau nilai yang dianggap baik. Dharma yang dimaksudkan disini adalah semua aturan yang telah disepakati

bersama dan dianggap baik secara bersama-sama. Sehingga, penghargaan terhadap kedaulatan merupakan posisi rasional untuk bisa menekan konflik. Oleh sebab itulah hukum internasional harus menjadi fondasi dasar Negara dalam pemahaman kedaulatan. Disisi lainnya adalah penghormatan kedaulatan diukur ula dari Negara tersebut menginterpretasikan hukum internasional kedalam hukum nasional. Indonesia telah membuat aturan Ruang Tata Kelola Wilayah yang menjadi aturan dalam menjaga wilayah NKRI untuk tidak diancama, di perebutkan atau diambil oleh Negara lain. Lebih lanjut, yang bisa dilakukan Indonesia adalah membentuk *collective security*. Acharya menyampaikn tiga poin inti dari konsep ini a) keamanan non tradisional adalah mengancam Negara. Penulis berargumen bahwa klaim China terhada wilayah Natuna merupakan ancaman tradisional dan juga akan berdampak pada ancaman non tradisional kedepannya. B) *habit of dialogue*, pada poin ini Indonesia harus lebih menekankan pendekatan diplomatis dari pada konfrontasi. Itu artinya dengan posisi Indonesia yang strategis baik di IORA, Indo Pasifik- ASEAN, dan bahkan menjadi dewan keamanan tidak tetap BB merupakan ruang , instrument yang baik bagi Indonesia untuk menekan China melalui negosiasi. Artinya China bisa dipermalukan di forum-forum tersebut jika tidak memiliki dasar kalam dan c) persoalan keamanan adalah persoalan bersama, yaitu

dimana dengan memanasnya situasi di laut China Selatan dan juga mendera posisi Indonesia maka Indonesia harus berinisiatif untuk menjaga netralitas dan sentralitasnya sebagai Negara netral Netral bukan berarti tidak bisa ganas. Tapi netral harus tegas dan mampu menempatkan posisi strategisnya. Dengan demikian, penting kiranya Indonesia harus menjadi katalisator, fasilitator dan menejer dalam mempertemukan semua aktor yang memans di Laut China Selatan termasuk meminta pertanggung jawaban China atas klaim Pulau Natuna Utara. Indonesia harus bisa mempertemukan dua hal yakni a) aktor yang terlibat dalam konflik dan b) aktor yang menjadi trigger. Amerika Serikat adalah trigger dalam situasi ini sehingga pertemaun antara Amerika, China dan aktor yang berkonflik sangat penting. Itu artinya metode negosiasi yang digunakan adalah Readyness dalam istilah William Zartman. Sebab dunia anarkis itu dalah seperti puzzel yang terpecah-pecah sehingga, dengan mencocokkan adalah poin mendasar untuk menyelesaikan persoalan ini termasuk klaim terhadap Natuna Utara.

Menurut John Lovell setiap negara yang mengembangkan kebijakan luar negeri berusaha menerapkan tipe strategi, ada 4 tipe strategi yang dicetuskan oleh John Lovell :Struktur Sistem Politik, Persepsi Elit Politik, Kapabilitas Dalam Negeri dan



Strategi Negara-Bangsa Lain Menyikapi situasi ini terdapat 4 tahap strategi kebijakan luar negeri yaitu yang diantaranya:

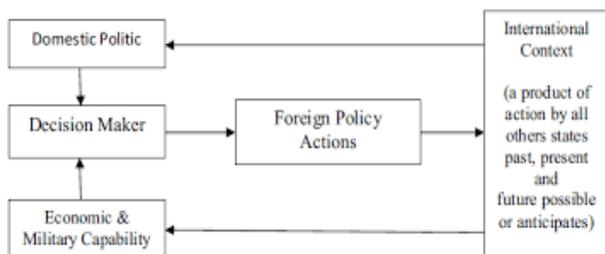
- a. *Leadership Strategy*: Leadership strategy atau strategi pemimpin ini menganggap suatu negara memiliki kapabilitas yang superior atau dapat dikatakan memiliki kapabilitas yang tinggi sehingga strategi negarabangsa lain hanyalah sebagai pendukung dari kebijakan yang diambil oleh negara tersebut.
- b. *Concordance Strategy*: Dalam Concordance strategy disini penulis akan mengistilahkan 2 negara-bangsa. Negara pertama ialah negara-bangsa A adalah negara yang memiliki kapabilitas yang tinggi atau dapat dikatakan sebagai negara-bangsa dengan kapabilitas superior sedangkan negara kedua ialah negara-bangsa B yang kapabilitasnya lebih rendah dari pada negara-bangsa A. Pada pengaplikasiannya di Concordance strategy maka negara-bangsa A akan mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan

terhadap superioritas kapabilitas negara

- c. *Accommodation Strategy*: Dari paksaan negara-bangsa A terhadap negara-bangsa B untuk mengakui negara-bangsa A memiliki kapabilitas yang superior maka dari situ pula negara-bangsa B diharapkan mampu untuk membentuk strategi terhadap penyesuaian-penyesuaian terhadap konflik dan untuk menghindari konflik yang ada.
- d. *Confrontation Strategy*: Dalam Confrontation strategy disini Jika terjadi konflik dan dilihat dari accomodation strategy maka negara-bangsa B telah atau sudah pasti membentuk strategi yang bukan tidak mungkin di waktu kedepan negara-bangsa B akan menerapkan strategi konfrontasi (confrontation strategy) ketika kapabilitas negara-bangsa B meningkat tanpa adanya lagi campur tangan negara-bangsa A.

Penulis menyimpulkan bahwa strategi formulasi Indonesia tetap sesuai dengan karakter negaranya dan amanat konsstitusi. Namun situasi ini bisa saja berubah apabila Indonesia telah berubah kapabilitasnya menjadi negara *big power* atau *super power*. Menurut

penulis ada dua hal yang harus dilakukan yakni tetap pada konsistensi pendekatan diplomatic sebagai formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah membangun kapasitas militer Indonesia yang kuat. Itu artinya konsekuensi negara besar dengan basis negara kepulauan adalah menyiapkan finansial yang besar untuk kebutuhan militer, Sehingga status Indonesia bisa saja berubah menjadi Sandhi dalam istilah teori Mandala. Dengan demikian strategi *sea denial, see control* dan bisa berkembang *power projection*. Seperti Model William D Copland berikut:



Sumber: Warsito, 1998

## PENUTUP

Pertahanan dan keamanan adalah hal penting bagi suatu negara. Pertahanan adalah perkara teknis dan instrumental yang memastikan tidak ada aktor lain yang mengancam negara tersebut. Disisi lain keamanan adalah cara pandang atau konsepsi yang ditanamkan dalam ideasional bahwa

negara tersebut harus bisa menahan dan bertahan hidup dari ancaman sehingga bisa melindungi nasibnya baik dari gangguan dari dalam maupun dari luar. Selain itu perubahan ruang lingkup keamanan yang meluas merubah format keamanan itu sendiri dimana ancaman terhadap negara bukan hanya aktor negara tetapi juga aktor non negara dengan berbagai model ancaman yang kemudian dikenal dengan ancaman tradisional dan non tradisional.

Salah satu fakta yang menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara kepulauan adalah asertifnya China di Laut China Selatan. Konsekuensinya adalah klaim terhadap wilayah Laut Natuna yang secara yuridiksi telah menjadi milik Indonesia sejak lama. Klaim sepihak tersebut membuat stabilitas keamanan di kawasan ASEAN dan terkhusus Indonesia merasa terganggu. Adanya *Code of Conduct* yang diinisiasi Indonesia ternyata tidak menyurutkan minat China untuk mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah penangkapan ikan negara tersebut. Hal negatifnya adalah tahun 2019 yang lalu kapal pengawas pantai China mengawasi nelayan China yang mengambil ikan secara ilegal di wilayah Natuna. Indonesia sendiri geram dengan tindakan tersebut baik respons presiden dan Menteri Luar Negeri yang pada intinya menyampaikan bahwa wilayah Natuna adalah kedaulatan Indonesia yang telah diakui PBB dan harusnya



China menaati hukum internasional sebagai rasa hormat kepada negara lain.

Respons Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbasis middle power tentunya harus sesuai dengan amanat konstitusi dan karakter negara. Sehingga, respons Indonesia masih menggunakan diplomasi dan negosiasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi yang kreatif, transparan, luwes adalah karakter diplomasi Indonesia. Dengan demikian peran Indonesia sebagai katalisator, fasilitator dan menejer dalam mengawasi wilayah Natuna dan menjaga stabilitas ASEAN adalah upaya Indonesia agar tetap berperan baik sebagai negara merdeka maupun bagian dari pendiri ASEAN. Dengan demikian secara teoritik kebijakan luar negeri Indonesia masih menggunakan model akomodasi yakni pencari titik temu dari setiap aktor yang berkonflik, yang artinya Indonesia ada pada posisi Asana dalam lingkaran konsentris Mandala. Hal ini bisa berubah jika status Indonesia menjadi negara *big power* atau *super power*. Dan yang perlu diperhatikan adalah sekalipun Indonesia menggunakan pendekatan diplomatik tetapi hal penting harus mengembangkan alat pertahanannya agar bisa melawan negara lain sebagai bentuk deterens, defensif atau ofensif bahkan *power projection* kepada negara lain. Itu

artinya Indonesia punya posisi yang kuat dan berwibawa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis :A Comparative Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Carlnaes, W. (2013). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusamedia.
- Chris Alden, A. A. (2017). *Foreign Policy Analysis New Approaches*. London: Routledge.
- Dellios, R. (2003). "Mandala: From Sacred Origin to Sovereign Affair in Traditional Southeas Asia". . Queensland: Bond University: CEWCES Research Paper Paper 8. .
- Effendi, Y. (2019). Finding New Regional Mandalas: Indonesia Maritime Strategy Between. *MANDALA: Jurna Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 2 No.2 pp 133-150.
- Fathun, L. M. ( Vol 2 No 02 (2017):). Kebijakan ideosinkretik (wholistic) Joko Widodo (jokowi) dalam konpeernsi asia afrika tahun 2015. *Jurnal dinamika global* , 42-67.
- Fathun, L. M. (2016). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim di Era Jokowi. MIHI UMY.
- Fathun, L. M. (2017). Kebijakan GeopolitikPoros MaritimDi EraJokowi Dalam Frame Ideologi. *Power International Relation*.
- Farhana, K. d. (2018). *Keamanan MaritimASEAN dalamPrespektif Ekonimi Politi*
- H. M. Fauzan, B. S. (2017). *KamusHhukum dan Yrisprudensi*. Depok: Kencana.



- Holsti, K. (2016). : *A Pioneer n International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies* . London: Springer.
- Hudson, V. (2008). *The History and Evolution of Foreign Policy Analisis* . In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne, (Eds), *Foreign Policy : theories, actors, cases,*. London: Oxford University Press.
- Jean Frédéric Morin, J. P. (2018). *Foreign Policy Analysis A ToolboxThe Editor(s) (if applicable)*. London: Pelgrave Mcmilan.
- Likadja, F. E. (1988). *hukum laut dan undang-undang perikanan*. jakarta: ghalia indonesia.
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP#ES.
- Melissen, R. v. (2007). *City Diplomacy :The Expanding Role of Cities in International Poitics*. Netherlands: Netherlands Institute of International Relations Clingedael .
- Mintz,, Alext D. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. London: Cembridge University Press.
- Mishra, S. (2012). Kautilya's Mandala Theory. . *Research J. Humanities and Social Sciences*, 3(1): Jan- March p/ 145-148.
- Neack, L. (2019). *Studying Foreign Policy Comparatively Cases and Analysis*. New York: Rowman& Littlefield.
- Panduwinata, F. d. (2018). Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia. *CSIS WORKING PAPER SERIES*, pp1-40.
- Rajeev. (2011). Inter- State Relations in Kautilyan Arthasastra. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, Vol.II Issue II, p.1-4.
- Rosenau, J. (1974). *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. London: SAGE
- Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study Of Foreign Policy*. Newyork: Nichols Publishing Company.
- Spies, Y. K. (2019). *Global Diplomacy and International Society*. Johannesburg: Palgrave Macmillan.
- Shahi, D. (2019). *Kautilya and Non Western IR Theory* . USA: Palgrave macmilln .
- Shekhar, V. (2018). *Indonesian' Foreign Policy and Grand Sstrategy in the 21 Century : Rise of an Indo- Pacific Power*. USA: Routledge.
- Warsito, T. (1998). *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasanya*. Yogyakarta.: BIGRAF Publishing.
- wirawan, j. (2016, juni 22). *hak berdaulat indonesia di zona ekonomi eksklusif*. Retrieved juni 2020, 4, from BBC: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
- Yanyan Mochamad Yani, I. M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

#### Internet

- Ant, j. . (2016, maret 24). *sikap indonesia ke china terkait insiden natuna sudah tepat*. Retrieved juni 4, 2020, from news.okezone: <http://www.news.okezone.com>

- Ayu Azanella, Luthfia.(2019). *Masuknya Kapal China ke Perairan Natuna yang Diprotes Indonesia* <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/164819565/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-diprotes-indonesia?page=all>. diakses 25 Agustus 2020



Gischa, Serafica. (2020). *Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia*.<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>. diakses 25 Agustus 2020

Sebayang, Rehia. (2020). *Ramai-Ramai Negara ASEAN Geram Karena Klaim Laut China*.<https://cnbcindonesia.com/news/20200106140946-4-127958/ramai-ramai-negara-asean-geram-karena-klaim-laut-china>. Diakses 25 Agustus 2020

NH Kertopati, Susaningtyas. (2020). *Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna*.<https://www.inews.id/news/nasional/mengkaji-penyelesaian-konflik-natuna>. Diakses 25 Agustus 2020

Viva Kusnandar, Anggaran Militer Indonesia Hanya 3 Persen dari Tiongkok (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/13/anggaran-militer-indonesia-hanya-3-persen-dari-tiongkok>, 2020) diakses 25 Agustus 2020.

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>. (2019). *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*. diakses 25 Agustus 2020.

Thomas, V. F. (2020, Januari 9). *Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya*. Retrieved Juni 7, 2020, from <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk>